

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengingat dapat menghambat kegiatan sosial dan sehari-hari, kepadatan lalu lintas berubah menjadi masalah yang harus segera diatasi. Salah satu faktor penyebab kemacetan di Kabupaten Kebumen adalah banyaknya volume mobil yang masuk ke wilayah tersebut, sehingga menyebabkan semakin banyaknya kendaraan angkutan pribadi dan umum yang tidak tertib. Volume lalu lintas kendaraan yang terus meningkat menyebabkan ketidaseimbangan kapasitas jalan. Adanya penurunan kapasitas ruas jalan juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti memarkir kendaraan di sisi jalan utama, pelaku UMKM yang berjualan sembarangan atau lokasi bongkar muat barang.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerapkan kebijakan lalu lintas yang disebut kebijakan jalan satu arah yang di terapkan di sekitar Alun-Alun Kebumen. Menurut Ketua Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen, Bapak Hariyanto Fadeli menilai kebijakan jalan satu arah ini disebut sebagai “Program Ujug-ujug”. Menurutnya Program Pemerintah Daerah, harus mampu menjawab persoalan warga masyarakat, meski dibayang-bayangi keterbatasan anggaran. Program ini mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 untuk uji coba secara permanen. Polemik terkait penerapan jalan kebijakan jalan satu arah di koridor perkotaan Kebumen muncul sejak awal diujicobakan. Meski mendapat dukungan dari kalangan

pengusaha Tionghoa, namun banyak juga masyarakat yang mengeluh dan tidak setuju atas kebijakan itu. Pasalnya pelaksanaan pembangunan daerah, seharusnya mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengedepankan regulasi dan tata kelola. Kebijakan jalan satu arah di Kota Kebumen dianggap sebagai kebijakan yang tiba-tiba dan tanpa banyak perumusan atau penjelasan yang jelas. Kebijakan ini diterapkan dengan cepat dan tanpa banyak diskusi sebelumnya, sehingga dinilai sebagai kebijakan yang tiba-tiba dan tidak terencana dengan baik. Pemberlakuan kebijakan jalan satu arah merupakan upaya Pemkab Kebumen guna mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar alun-alun Kebumen (beritakebumen.co.id, 2021). Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Perhubungan. Jalan yang dirubah merupakan akses utama yang biasa dilalui oleh masyarakat Kebumen dalam beraktivitas. Kebijakan tersebut dilakukan agar lalu lintas Kota Kebumen menjadi lebih tertata dan diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Seperti berita yang dikutip dari detiknews.com pada tanggal 24 April 2021, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyatakan bahwa pemberlakuan jalan satu arah memiliki tujuan untuk menurunkan kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan. Alun-Alun Kebumen berada di pusat kota yang terletak berdekatan dengan kantor-kantor publik lainnya. Selain itu pusat berbelanja, sekolah-sekolah dan sebagian besar UMKM juga berada di sekitar Alun-Alun Kebumen. Hal tersebut menjadikan lalu

lintas di Kabupaten Kebumen sangat padat. Apalagi di musim libur panjang, keluhan masyarakat mengenai kemacetan lalu lintas semakin tidak terkendalikan. Pada penerapan kebijakan tersebut, terdapat empat ruas jalan yang akan digunakan untuk kebijakan jalan satu arah yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Kusuma dan Jalan Kolopaking. Adapun Jalan Pahlawan dibuat satu arah ke barat, Jalan Mayjen Sutoyo satu arah ke timur, Jalan Kusuma satu arah ke selatan dan Jalan Kolopaking satu arah ke barat. Dengan kebijakan ini diharapkan sentra ekonomi masyarakat Kabupaten Kebumen akan menjadi tumbuh dan berkembang. Apalagi kedepannya, kebijakan ini juga akan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Kebumen dengan melengkapi lampu Solar Cell pada ruas jalan yang di produksi oleh para lulusan SMK di Kebumen (Heksantoro, 2021).

Alun-Alun Kebumen merupakan lokasi yang sangat strategis bagi kehidupan masyarakat setempat di bidang ekonomi dan sosial. Hal tersebut dikarenakan letak Alun-Alun Kebumen berada di pusat kota, dimana hampir seluruh kegiatan masyarakat Kabupaten Kebumen berpusat di lokasi tersebut. Tempat ini sering dianggap sebagai jantung kota dikarenakan berbagai aktivitas dan interaksi dari penduduk setempat, wisatawan, dan pelaku bisnis berpusat di lokasi tersebut. Alun-Alun Kebumen sering dijadikan sebagai tempat berkumpul oleh masyarakat Kabupaten Kebumen. Penduduk setempat sering datang ke sini untuk bersosialisasi, bermain, atau sekedar menikmati waktu luang. Hal ini menciptakan suasana sosial yang unik di mana individu dari berbagai lapisan masyarakat dapat berinteraksi.

Tidak hanya untuk berkumpul Alun-Alun juga sering digunakan untuk menggelar berbagai acara budaya, seperti pementasan seni, konser musik, pertunjukan tari tradisional, dan festival lokal. Kegiatan tersebut dapat membantu mempromosikan keberagaman budaya dan seni khas Kabupaten Kebumen. Masyarakat menjadikan Alun-Alun Kebumen sebagai salah satu tujuan wisata yang cukup diminati (Hindarto, 2017).

Menurut data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai 9,2 persen per tahun, yang akan meningkatkan volume kendaraan di ruas-ruas jalan. Kemungkinan terjadinya kemacetan setelah adanya kebijakan sistem satu arah ini yaitu berada di 9 titik diantaranya Simpang 4 SMAN 1 Kebumen, Simpang 4 SMPN 1 Kebumen, Simpang 4 Polsek Kebumen, Simpang 3 Pasar Burung, Simpang 3 Kantor Pos, Simpang 3 Bank Jateng, Simpang 4 SMPN 5 Kebumen, Simpang 4 Pegadaian dan Simpang 3 Wonoyoso. Adanya permasalahan tersebut, pemerintah melakukan penertiban area parkir antara lain roda empat di susun sejajar dengan arah jalan dan sepeda motor diparkir dalam satu baris. Akibat penerapan kebijakan ini juga berdampak terhadap kondisi rute angkutan umum di Kabupaten Kebumen (Heksantoro, 2021).

Berikut merupakan gambar denah jalur jalan satu arah yang sudah dilaksanakan di Kota Kebumen.

**Gambar 1. 1 Denah Jalur Jalan Satu Arah**



Sumber : (Siyami, 2021)

Penerapan kebijakan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap UMKM yang berada di sekitar Alun-Alun Kebumen. Sepanjang rute jalan satu arah Kota Kebumen merupakan area perbelanjaan, warung makan, usaha mikro dan kecil lainnya, serta area perkantoran. Jenis usaha yang terletak di sepanjang rute jalan satu arah Kota Kebumen seperti warung makan, konter handphone, dealer kendaraan, bank, salon, pedagang kaki lima, dan usaha jasa atau dagang lainnya. Para pelaku UMKM di sekitar Alun-Alun Kebumen berpotensi mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut sangat disayangkan, karena akan berdampak pada keberlangsungan usaha mereka. Bagaimana para pelaku UMKM di sekitar Alun-Alun Kebumen menyikapi situasi ini? Apakah mereka sudah mencoba berbagai strategi penyesuaian, seperti layanan pesan antar atau berkolaborasi dengan

bisnis lain? Terlepas dari masalah ekonomi, terdapat masalah lain yang timbul, karena kebijakan ini sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan sangat secara menyeluruh. Apakah pelanggan merasa lebih aman atau nyaman ketika berinteraksi dengan UMKM di tengah kebijakan ini. Kebijakan jalan satu arah dirasa mengganggu aksesibilitas pelanggan terhadap pelaku UMKM. Kemungkinan masyarakat mengunjungi toko atau UMKM bisa menurun jika aksesibilitas dibatasi. Aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan volume penjualan UMKM, sehingga perubahan kebijakan ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan bisnis kecil dan menengah di sekitar Alun-Alun Kebumen. Kebijakan jalan satu arah dapat mengubah arus logistik dan transportasi UMKM, yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan baku, waktu pengiriman, dan harga distribusi. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa luas pelaku UMKM dan masyarakat telah mengadopsi kebijakan ini. Proses partisipasi yang efektif dapat mendorong pengembangan kebijakan inklusif dan perekonomian lokal. Berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti naik atau turunnya tingkat pengangguran, perluasan ekonomi lokal, dan kelestarian lingkungan, dapat diakibatkan oleh perubahan peraturan jalan satu arah. Kebijakan jalan satu arah dapat menciptakan kesempatan baru atau menimbulkan tantangan bagi UMKM. Hal ini dapat terkait dengan perubahan pola konsumsi, kebijakan parkir, atau dukungan infrastruktur lainnya (Indonesia & Indonesia, 2015).

Hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM di sekitar Alun-Alun Kebumen dipengaruhi banyak faktor. Berbagai hambatan tersebut antara lain menyangkut masalah penurunan pendapatan karena kunjungan pelanggan dan transaksi yang berpotensi menurun, sangat merugikan UMKM secara finansial. Dampak sosial dan ekonomi, seperti tingkat pengangguran yang dikhawatirkan meningkat, perluasan ekonomi lokal, dan dampak lingkungan. Kebijakan jalan satu arah dapat mempengaruhi pola logistik, ketersediaan bahan baku, waktu pengiriman, dan biaya distribusi, sangat menghambat operasional UMKM. Ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan yang utama. Apakah kebijakan ini membuka peluang baru atau menimbulkan tantangan baru terhadap para pelaku UMKM. Pelaku UMKM perlu memahami dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Atas dasar itu, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“EVALUASI KEBIJAKAN JALAN SATU ARAH TERHADAP UMKM DI SEKITAR ALUN-ALUN KOTA KEBUMEN TAHUN 2022-2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan sebelumnya, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi dari kebijakan jalan satu arah terhadap pelaku UMKM di Alun-alun Kabupaten Kebumen tahun 2022-2023?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengevaluasi kebijakan jalan satu arah mempengaruhi pendapatan dan perubahan UMKM di sekitar Alun-Alun Kota Kebumen”.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Selain itu kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang publik di sekitar Alun-Alun Kebumen sehingga pelaku UMKM dapat melaksanakan promosi atau kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu serta pemahaman terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem jalan satu arah terhadap UMKM dan pelaku usaha dan memberikan rekomendasi yang tepat jika ditemukan sebuah kekurangan.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi dukungan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan serta memahami tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM dan pemerintah dapat

mengembangkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan.

### **c. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca terkait dampak jalan satu arah terhadap UMKM dan serta dapat dijadikan pedoman dan menjadi tolak ukur untuk peneliti berikutnya.

## **E. Literatur Review**

Pada penelitian ini penulis menggunakan 15 *literature review* yang relevan dengan judul penelitian ini. Observasi ditujukan agar dapat menemukan perbedaan yang menarik dari penelitian sebelumnya untuk dikaji kembali pada penelitian ini. Selain itu dengan adanya observasi ini peneliti juga mengetahui kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama, dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang” yang ditulis oleh (Rahman Sudrajat et al., 2020). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sumedang mengupayakan dan menyusun sebuah alternatif berupa cara-cara untuk mengatasi kebijakan publik, dikarenakan di setiap pelaksanaan kebijakan public, tidak ada yang tahu bagaimana hasil akhir dari kebijakan tersebut. Pemerintah wajib membuat sebuah rencana jangka panjang, baik itu rencana dalam keadaan buruk. Hal itu bertujuan agar upaya yang sudah disusun dapat dilaksanakan dalam keadaan dan pada waktu tersebut. Langkah yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Sumedang

yaitu dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2019 memuat rekayasa lalu lintas kawasan dalam kota. Tujuannya supaya masyarakat lebih menaati peraturan yang ada. Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Polres Sumedang juga memberikan informasi kepada masyarakat sebelum memberlakukan kebijakan jalan satu arah di jalan Mayor Abdurahman menggunakan fasilitas yang memadai.

Penelitian kedua, dengan judul “Pengembangan Produk Unggulan UMKM Dalam Mendukung Pertumbuhan” yang ditulis oleh (Mariska et al., 2023). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa strategi utama yang dilakukan UMKM di Desa Sukasari untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat masyarakat adalah pengembangan produk unggulan. UMKM memiliki peluang lebih besar untuk menarik pelanggan dengan barang-barang khas dan berkualitas tinggi baik dari penduduk lokal maupun luar daerah, dengan demikian akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian desa secara keseluruhan. Inovasi produk membantu UMKM menghasilkan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan memperoleh pangsa pasar selain membantu mereka merespons kebutuhan pelanggan dan pergeseran pasar. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi akademis, dan komunitas lokal dapat memajukan UMKM dengan memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan sumber daya, pelatihan, dan pendampingan. Selain membuka lapangan kerja baru, kemungkinan akan menghasilkan produk unggulan UMKM dan juga menurunkan angka pengangguran di pedesaan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki potensi untuk menjadi kekuatan utama di balik pengembangan perekonomian desa, namun untuk mendorong perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan di tingkat lokal, diperlukan bantuan lintas sektor dan keterlibatan proaktif.

Penelitian ketiga, dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minipolitan di kabupaten Bogor” yang ditulis oleh (Santoso et al., 2019). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dilihat dari sudut pandang William Dunn pada tahun 2003 terdapat enam faktor penilaian masuk dalam perdebatan strategi pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bogor. Aspek efektivitas dan efisiensi sudah dalam kondisi baik, namun masih terdapat permasalahan pada empat dimensi lainnya yaitu responsivitas, pemerataan, kecukupan, dan ketepatan. Kelemahan utamanya adalah kurangnya reaksi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap kebijakan. Dimensi kecukupan dikaitkan dengan mahalnya harga pakan ternak yang dapat menurunkan pendapatan peternak, sedangkan dimensi pemerataan menggambarkan kesenjangan distribusi. Ada beberapa keterbatasan dalam ketepatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan keakuratan sosial budaya di kalangan generasi milenial yang kurang berminat pada sektor primer, misalnya budidaya ikan lele yang menjadi fokus pembangunan.

Penelitian keempat, dengan judul “Dampak Implementasi Kebijakan Face-Off Jalan Hos Cokroaminoto terhadap Interaksi Ruang Terbuka

Publik” yang ditulis oleh (Wafa, 2023). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa inisiatif pemerintah untuk mempercantik dan menata tata ruang fisik kota berdampak pada pelaksanaan aturan ruang terbuka publik. Dulunya hanya sekedar trotoar, namun kini menjadi tujuan wisata yang ramai. Responden merasa senang dengan perkembangan ini meskipun ada dukungan dari pemerintah karena hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan dan memulai usaha baru. Ada tiga kelompok masyarakat yang memanfaatkan ruang terbuka publik: masyarakat umum, komunitas lokal, dan pemerintah sendiri. Masyarakat memanfaatkan ruang tersebut untuk melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi dengan membuat kawasan HOS Cokrominoto lebih baik lagi.

Penelitian kelima, dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Di Jalan Malioboro Dan Jalan Tentara Pelajar)” yang ditulis oleh (Fatimah et al., 2022). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan perbaikan pada sistem lalu lintas dan angkutan umum Kota Yogyakarta. Inisiatif rekayasa jalan belum menghentikan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Di tiga puluh persimpangan jalan di Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan menggunakan teknologi ATCS untuk menjaga ketertiban dan memperlancar arus lalu lintas. Minimnya lahan parkir di Jalan Malioboro serta Jalan Pelajar menimbulkan keluhan dari para pengguna jalan, sehingga berdampak negatif terhadap program pengoperasian dan optimalisasi parkir.

Kurangnya kesiapan masyarakat terhadap perubahan, kepentingan pelaku korporasi, dan kurangnya pendanaan untuk pengembangan teknologi ATCS merupakan beberapa hambatan yang dihadapi infrastruktur, meskipun infrastruktur sudah siap.

Penelitian keenam, dengan judul “Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Gunung Sugih Terhadap Usaha Rumah Makan Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” yang ditulis oleh (Irfan et al., 2021). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pendapatan usaha restoran, UMKM penjual pernak-pernik, dan bengkel mobil di sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mulai dari pintu keluar Terbanggi Besar hingga pintu keluar Gunung Sugih menurun signifikan akibat pembangunan jalan tersebut. Perkembangan usaha baru di dekat pintu keluar tol Terbanggi Besar paling terkena dampaknya. Salah satu opsi lain yang bisa dilakukan adalah memasang iklan atau memasang panduan arah sebelum mencapai tol Gunung Sugih dan Terbanggi Besar agar mengimbangi penurunan pendapatan UMKM restoran dan souvenir. Sementara itu, sejumlah bank bisa memberikan akses cepat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi perusahaan bengkel mobil. Pintu keluar tol Terbanggi Besar disarankan untuk dimanfaatkan dengan membangun tempat penjualan tertentu guna mendorong berkembangnya perusahaan-perusahaan baru di sekitar pintu keluar tol tersebut.

Penelitian ketujuh, dengan judul “Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Mktt Terhadap Umkm Pasar Bengkel Kabupaten

Serdang Bedagai” yang ditulis oleh (Wilson ButarButar & Rahayu, 2023). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, proyek Jalan Tol MKTT mendorong perluasan perekonomian. Dampak positifnya antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai jalan tol dan kreatifnya strategi pemasaran oleh-oleh dodol. Pengaruh tersebut dirasakan oleh UMKM di Pasar Bengkel. Namun pengaruh pandemi Covid-19 dan sepiya wisatawan berdampak pada menurunnya dunia usaha. Pengurangan biaya tenaga kerja, pendapatan, dan biaya produksi souvenir semuanya mengalami penurunan. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi dampak ini adalah dengan mendorong pasar ritel kontemporer, menawarkan pelatihan pemasaran digital, dan mencakup kios UMKM. Selain itu, perusahaan UMKM juga berupaya menyiasatinya dengan cara menyerahkan produksinya ke pasar-pasar yang sangat diminati, khususnya varian rasa dodol khas Kabupaten Serdang Bedagai.

Penelitian kedelapan, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara” yang ditulis oleh (Dewi et al., 2023). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perluasan UMKM. Perbaikan jalan, menurut peserta UMKM, meningkatkan minat konsumen, memberikan rasa aman dan nyaman dalam

mengangkut barang, serta meningkatkan pendapatan mereka yang sebelumnya kecil. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi jalan atau sarana transportasi darat berkontribusi signifikan terhadap perluasan UMKM di Desa Tanjung.

Penelitian Kesembilan, dengan judul “Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Kegiatan Jajanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” yang ditulis oleh (Manullang & Samosir, 2019). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mencanangkan upaya strategis dengan dua komponen utama: pembangunan Tol Medan-Tebing Tinggi yang termasuk dalam pembangunan Tol Trans Sumatera. Terletak di jalan raya Sumatera, Pasar Bengkel telah berfungsi sebagai pusat perekonomian sejak tahun 1970an. Komunitas UMKM di sekitar Pasar Bengkel mengalami penurunan tajam pendapatan per kapita sebesar 50%, hilangnya tenaga kerja, dan penurunan pendapatan asli daerah dari retribusi akibat pembangunan jalan tol tersebut. Namun, dampak positifnya memang ada, seperti penurunan polusi udara dan lalu lintas.

Penelitian kesepuluh, dengan judul “Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan Di Jalan Cikutra, Kota Bandung” yang ditulis oleh (Iscahyono et al., 2023). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa operasional pedagang kaki lima berdampak buruk terhadap kualitas layanan jalan. Berbagai jenis pedagang kaki lima, yang melayani kelompok ekonomi berbeda, berdagang di sepanjang jalan dengan

pola distribusi memanjang. Penjual ini menggunakan gerobak dorong, piket, kios/tenda semi permanen, dan tenda. Seiring dengan mulainya aktivitas konsumen, waktu penjualan dimulai pada pagi hari. Berdasarkan survei volume arus lalu lintas, PKL mempunyai dampak yang besar terhadap volume lalu lintas, apalagi mengingat kondisi saat ini. Analisis terhadap keterlambatan perjalanan menunjukkan bahwa sejumlah variabel, antara lain pejalan kaki, parkir di tepi jalan, mobil yang keluar masuk, dan transportasi yang bergerak secara pelan, berkontribusi terhadap keterlambatan yang sangat signifikan, terutama di pagi hari. Untuk lebih jelasnya literature review dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 1 Literatur Review**

No.	Peneliti	Judul Penelitian Nama Jurnal	Hasil
1	(Rahman Sudrajat et al., 2020)	Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang  <i>(Journal of Regional Public Administration (JRPA) (2020) 5)</i>	Untuk mencoba mengatasi tantangan yang muncul Pemerintah Kota Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2019 yang menguraikan tata cara rekayasa lalu lintas di kawasan dalam kota. Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan. Selain itu, pemerintah juga menginformasikan kepada masyarakat mengenai tujuan program jalan satu arah sebelum diberlakukan di jalan Mayor Abdurahman. Pelaksanaannya dilakukan petugas Polres Sumedang dan Dinas Perhubungan dibantu dengan fasilitas yang memadai.
2	(Mariska et al., 2023)	Pengembangan Produk Unggulan UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai  <i>(Journal of Human And Education (2023) 3(2) 292-298)</i>	Pengembangan produk unggulan merupakan kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat sehingga menjadikan identitas dan ciri khas pada UMKM di Desa Sukasari.
3	(Santoso et al., 2019)	Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minipolitan di kabupaten Bogor	Perspektif William Dunn (2003) mencakup 6 dimensi evaluasi yang digunakan sebagai pengembangan kawasan miniapolitan di Kabupaten Bogor. Efektivitas

		<i>(Journal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (2019) 45(1) 17-32)</i>	dan Efisiensi merupakan dimensi dengan kondisi yang baik. Sedangkan reseponsivitas, perataan, kecukupan, dan ketepatan kebijakan masih memiliki kelemahan
4	(Wafa, 2023)	Dampak Implementasi Kebijakan Face-Off Jalan Hos Cokroaminoto terhadap Interaksi Ruang Terbuka Publik  <i>(Journal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) (2023) 7(2) 2598-9944)</i>	Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengubah penataan ruang kota dari trotoar sederhana menjadi destinasi wisata yang ramai berdampak pada pelaksanaan kebijakan ruang terbuka publik. Pembangunan tersebut diterima dengan baik oleh responden meskipun dibangun sesuai dengan kebijakan pemerintah. Lahan yang dapat diakses digunakan oleh responden untuk meluncurkan usaha baru dan menaikkan omset penjualan. Di samping itu, sejumlah pelaku usaha yang sudah mendirikan warung di wilayah itu juga mengalami kenaikan pendapatan.
5	(Fatimah et al., 2022)	Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian di Jalan Malioboro dan Jalan Tentara Pelajar)  <i>(Journal POPULIKA/Vol.10 No.1 Tahun 2022 10(1))</i>	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta meningkatkan pengaturan lalu lintas dan angkutan umum untuk mengatasi kemacetan dengan pengembangan manajemen. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memanfaatkan teknologi untuk mengendalikan jarak jauh berupa ATCS (Area Traffic Control System) untuk mengendalikan lalu lintas. Program operasional pengelolaan parkir di Jalan Malioboro dan Tentara Pelajar yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum berfungsi dengan optimal, hal ini tampak dari masih banyaknya keluhan dari pengguna jalan mengenai minimnya lahan parkir. Prasarana sarana sudah terpenuhi dan memadai untuk terselenggaranya program pengendalian lalu lintas, dan

			peruntukan parkir. Rintangan dan tantangan lainnya diantaranya Keterbatasan dana untuk pengembangan teknologi ATCS, para pelaku usaha yang memiliki kepentingan, serta perilaku masyarakat yang belum siap menghadapi perubahan. Itulah beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.
6	(Irfan et al., 2021)	<p>Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Gunung Sugih Terhadap Usaha Rumah Makan Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</p> <p><i>(Journal Wacana Publik (2021) 15(02) 95-103)</i></p>	Dibangunnya JTTS menurunkan pendapatan restoran secara signifikan, UMKM yang menjual oleh-oleh, dan bengkel kendaraan di Jalan Tol Sumatera Tengah dari pintu keluar Tol Terbanggi Besar hingga pintu keluar Tol Gunung Sugih. Munculnya usaha-usaha baru di kawasan exit tol Terbanggi Besar. Pendekatan elektif Strategi yang dapat diambil untuk mempengaruhi penurunan gaji dari organisasi restoran dan UMKM. Pemerintah terlebih dahulu mengumumkan di pintu tol Gunung Sugih dan Terbanggi Besar bahwa terdapat kawasan kuliner di Jalan Raya Sumatera Tengah untuk UMKM yang menjual oleh-oleh. Hal ini juga akan berdampak pada bisnis bengkel kendaraan. Melalui sejumlah bank, kemudahan memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha bengkel mobil. Pemanfaatan apintu keluar tol Terbanggi Besar dengan membangun area khusus untuk berjualan di sekitar pintu keluar tol Terbanggi Besar merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi tumbuhnya usaha baru.
7	(Wilson ButarButar & Rahayu, 2023)	Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol MKTT	Jalan tol MKTT memiliki peran penting sebagai keefektifan dalam aktivitas manusia, barang , dan jasa termasuk untuk mendorong pertumbuhan

		<p>Terhadap Umkm Pasar Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai</p> <p><i>(Journal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) (2003) 7)</i></p>	<p>perekonomian di Pulau Sumatera. Pembangunan Jalan Tol MKTT membawa pengaruh terhadap aspek sosial dan aspek ekonomi terhadap UMKM Pasaar Bengkel. Sisi sosial yang menguntungkan adalah masyarakat memahami pentingnya jalan tol untuk mencegah konflik antar pihak. Dampak negatifnya ditemukan bahwa berkurangnya jumlah UMKM dikarenakan gulung tikar karena sepi pengunjung. Dampak positif aspek ekonomi ditemukannya bentuk pemasaran UMKM yang semakin berkembang dibarengi dengan inovasi baru dengan mempertahankan cita rasa dodol khas dari UMKM Kabupaten Serdang. Dampak negatifnya yaitu penurunan pendapatan yang tinggi, tenaga kerja dibatasi, penurunan harga, dan jumlah produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang menyediakan fasilitas penunjang berupa tirai bagi pelaku UMKM, dan memajukan terus perkembangannya</p>
8	(Dewi et al., 2023)	<p>Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan UMKM di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara</p>	<p>Pembangunan infrastuktur jalan terhadap pertumbuhan UMKM di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara menghasilkan dampak positif dan tentunya sangat signifikan. Pelaku UMKM merasakan bahwa pembangunan jalan membuat usaha menjadi lebih ramai dan lebih maju.</p>
9	(Manullang & Samosir, 2019)	<p>Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap</p>	<p>Perlunya dilakukan penilaian dampak sosio-ekonomi oleh pemerintah pusat dan daerah sebelum memulai pembangunan jalan tol. Dampaknya terhadap</p>

		<p>Kegiatan Jajanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p> <p>( <i>Journal Bisnis Terapan (2019) 3(02) 167-178</i> )</p>	<p>perekonomian masyarakat dan kualitas hidup masyarakat lokal harus dimasukkan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UMKM di kawasan Pasar Bengkel sangat menderita akibat dibangunnya tol Medan-Tebing Tinggi. Oleh karena itu, disarankan agar pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol, mempertimbangkan dan mengurangi dampak buruk terhadap perekonomian daerah.</p>
10	(Isahyono et al., 2023)	<p>Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan di Jalan Cikutra, Kota Bandung</p> <p>( <i>Journal Perencanaan dan Rekayasa Sipil (2023) 6</i> )</p>	<p>Kualitas pelayanan jalan sangat dipengaruhi oleh keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Cikutra. Aktivitas para pedagang kaki lima pelayanan jalan sehingga menyebabkan keterlambatan perjalanan, seperti mobil yang parkir di badan jalan, orang yang berlalu lalang di badan jalan, dan mobil yang datang dan pergi, menurunkan kualitas. Bentuk jalan, volume arus lalu lintas kendaraan, dan kondisi fisik merupakan elemen-elemen lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan jalan. Karena adanya berbagai kegiatan usaha di pinggir Jalan Cikutra, yang dapat mengubah susunan mobil yang melintasi bagian jalan tersebut, volume kendaraan tetap tinggi bahkan setelah pedagang kaki lima dipindahkan.</p>
11	(Permatasari, 2020)	<p>Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)</p> <p>(<i>Journal Social and Government (2020) 1 034-038</i> )</p>	<p>Implementasinya dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah merespons kebutuhan masyarakat. Langkah terakhir, evaluasi kebijakan, melibatkan penilaian manfaat, kelemahan, dan dampak kebijakan serta menetapkan standar untuk kebijakan berikutnya.</p>

			Kekurangan buku ini adalah kurangnya kedalaman teori dalam praktik evaluasi kebijakan, meskipun penulisannya jelas dan terstruktur dengan baik.
12	(Winarta et al., 2020)	<p>Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar</p> <p><i>(Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik (2020) 5(1) 28-42)</i></p>	<p>Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Gianyar menjadi topik pembahasan yang menunjukkan kompleksitas dari segi efikasi, efisiensi, kecukupan, penyaluran, daya tanggap, dan akurasi. Mengingat jumlah permintaan bantuan meningkat setiap tahunnya, jelas bahwa kebijakan tersebut masih belum efektif. Ketidaktahuan masyarakat terhadap program bantuan sosial menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut dan menunjukkan bahwa pemerintah kurang berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun pendekatan ini dianggap cukup tepat dalam mengatasi permasalahan besar yang dihadapi masyarakat dan menawarkan manfaat yang mungkin mereka alami sendiri. Keadilan menyatakan bahwa biaya dan imbalan harus didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Respon positif masyarakat menunjukkan keberhasilan kebijakan ini, namun masih ada banyak tugas yang harus diselesaikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran karena beberapa pengguna bantuan menerimanya lebih dari satu kali, yang menunjukkan bahwa statistik yang tepat masih kurang. Di sisi lain, capaian Kebijakan Dana Bantuan Sosial telah mengurangi beban biaya sehari-hari warga Kabupaten Gianyar secara signifikan.</p>

13	(Wicaksana et al., 2020)	<p>Skenario Pengentasan Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Gunung Rinjani</p> <p>( <i>Journal Planning for Urban Region and Environment</i> (2020) 9 )</p>	<p>Hasil analisis tegangan permukaan jalan setapak di jalan setapak Jalan Gunung Rinjani menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, kapasitas awal jalur tersebut adalah 1.944,73 skr/jam. Sekali lagi, volumenya bervariasi, dengan rata-rata sepanjang jam kerja pada akhir pekan, hari libur, dan hari libur, serta pada akhir jam kerja pada akhir pekan, hari libur, dan hari libur. Ketiga, rata-rata kapasitas jalur Jalan Gunung Rinjani terletak pada LOS C, dengan rasio kapasitas volume rata-rata sebesar 0,62 skr/jam. Skenario pengelolaan kapasitas jalan, khususnya penerapan kebijakan jalan satu arah, dapat menjadi strategi untuk mengurangi kemacetan, berdasarkan hasil analisis Level of Service (LOS). Dengan dilakukannya skenario ini, tingkat pelayanan Jalan Gunung Rinjani naik menjadi rata-rata kategori B, dengan rasio kapasitas volume rata-rata sebesar 0,26 skr/jam.</p>
14	(Nur Sarfiah et al., 2019)	<p>UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa</p> <p>(<i>Riset Ekonomi Pembangunan</i> (2019) 4(1) )</p>	<p>Perekonomian Indonesia terpuruk selama krisis keuangan tahun 1997–1998, namun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dianggap seperti penyelamat perekonomian negara. Sejak krisis, jumlah UMKM meningkat dan menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi gejolak ekonomi. Pada periode 2012–2017, UMKM juga mengalami kenaikan penambahan tenaga kerja yaitu dari 96,99% menjadi 97,22%. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, agar UMKM dapat mempunyai peran</p>

			kunci yang optimal dalam pengembangan ekonomi nasional diperlukan dukungan pemerintah untuk penguatannya.
15	(Iskandar et al., 2020)	<p>Pengaruh Karakteristik Usaha dan Wirausaha Terhadap Kinerja UMKM Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sukabumi</p> <p><i>(Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN) (2020) 4(1) 1-12 )</i></p>	<p>Temuan penelitian menyarankan dua pendekatan yang dapat digunakan: pertama, bekerja sama dengan perusahaan asing besar untuk mengembangkan bahan baku dan produk sekaligus meningkatkan keterampilan dan kreativitas pengolahan ikan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan budaya agar memaksimalkan kekuatan sumber daya alam dan pasar. Laki-laki yang menjalankan usaha budidaya ikan merupakan pemilik mayoritas UMKM di Kabupaten Sukabumi. Pengolah ikan dianggap memiliki sifat psikologis dan budaya yang unggul. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa jenis usaha pengolahan ikan, beserta ciri-ciri psikologis, budaya, dan demografi, mempunyai dampak positif terhadap keberhasilan usaha. Lebih banyak penelitian yang berkonsentrasi pada dampak ciri-ciri budaya nasional dan lokal harus dilakukan, begitu pula pembuatan kuesioner yang lebih terstandarisasi.</p>

Berdasarkan hasil analisis tinjauan pustaka diatas, studi mengenai kebijakan jalan satu arah mengacu pada teori kebijakan publik dan teori evaluasi kebijakan. Sebagai hasilnya, penelitian ini akan menerapkan teori tersebut untuk dapat dikaji kembali. Penelitian ini mengambil studi kasus pada UMKM di sekitar alun-alun Kebumen. Hal tersebut dilandaskan kasus ini merupakan fenomena baru yang terjadi di Kabupaten Kebumen sehingga belum banyak peneliti yang melakukan penelitian tersebut.

## **F. Kajian Dasar Teori**

### **1. Teori Kebijakan Publik**

Menurut Lasswell & Kaplan (1970) bahwa kebijakan adalah “*a projected program of goals, values and practices*”, sedangkan definisi kebijakan menurut Anderson (2006) yaitu “*Policy is defined as a relatively stable, purposive courses of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Pada hakikatnya kebijakan publik adalah suatu jenis kegiatan atau tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya sejalan dengan tujuan bersama (dalam konteks ini juga termasuk kelambanan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada saat ini). Oleh karena itu, sesuatu yang diciptakan oleh pemerintah berdasarkan peristiwa sosial dan dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat.

Tachjan (2008) mengemukakan bahwa kebijakan lingkungan mengacu pada situasi atau kejadian yang menjadi latar belakang

munculnya suatu “masalah” dalam kebijakan domain. Lingkungan ini memiliki dampak dan juga menerima pengaruh dari aktor-aktor kebijakan dan kebijakan itu sendiri. Sementara itu, inti dari substansi kebijakan adalah keputusan berdasarkan berbagai opsi yang saling terhubung dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak ahli yang berbagi perspektif mereka tentang kebijakan publik, termasuk Dye (2005), yang mengusulkan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*". Iskandar (2012) menyatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat rencana program, kegiatan, pilihan, tindakan, dan sikap yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat (aktor kebijakan) dalam rangka menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul. Menurut Nugroho (2012), kebijakan publik berkaitan dengan sejumlah isu, dimulai dengan keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Kedua, melalui formalisasi aturan dan kesepakatan dengan pemerintah. Ketiga, ini merupakan contoh kerja sama antara legislatif dan eksekutif (Herdiana, 2018).

Masalah publik berkaitan dengan analisis kebijakan (*public problem*). Tidak semua isu menjadi pengetahuan publik, meskipun banyak orang terlibat. Permasalahan publik mempengaruhi masyarakat atau mengganggu kepentingan elemen masyarakat tertentu. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang tidak terduga ketika kebijakan diusulkan sehubungan dengan isu-isu yang ada karena, dalam hal ini, hal tersebut

merupakan urusan publik dan dengan demikian merupakan subjek dari tindakan kebijakan. Kita dapat membedakan antara analisis kebijakan yang dilakukan sebelum diberlakukannya kebijakan publik tertentu, dan analisis kebijakan yang dilakukan setelah berlakunya kebijakan publik tertentu dengan menggunakan studi kebijakan. Sebelum adanya kebijakan publik, analisis kebijakan hanya menghasilkan ide-ide baru mengenai kebijakan publik jika didasarkan pada kepentingan publik. Tujuan dari analisis kebijakan, baik sebelum dan sesudah suatu kebijakan, adalah sama yaitu untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang cara membuat kebijakan yang lebih baik. Analisis kebijakan publik merupakan pedoman atau informasi lebih lanjut yang mampu dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini mencakup permasalahan yang perlu ditangani, upaya yang perlu dilaksanakan oleh organisasi publik untuk mengatasi permasalahan itu, dan opsi kebijakan potensial yang dapat dipertimbangkan melalui evaluasi berbeda berdasarkan tujuan kebijakan.

Mengingat tujuan utama kegiatan pembangunan adalah mengembangkan potensi manusia yang nantinya akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai sektor pembangunan lainnya, maka kebijakan publik menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang lainnya. Filsafat kebijakan pendidikan terutama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip luhur yang dituangkan dalam amanat konstitusi. Setiap kebijakan publik harus diimplementasikan dengan gagasan ini sebagai

panduan. Oleh karena itu, semua pihak terutama pemerintah harus memiliki kebijakan yang tidak memihak, terutama dalam hal keuangan atau anggaran (Nur & Guntur, 2021).

d. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan mengikuti proses perumusan dan persetujuannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu tindakan oleh orang atau kelompok dalam menggapai suatu tujuan berdasarkan suatu kebijakan yang sudah diterapkan merupakan implementasi dari kebijakan publik. Dampak yang timbul akibat penerapan suatu kebijakan disebut dampaknya. Mengevaluasi dampak implementasi kebijakan akan memberikan hasil yang sesuai atau tidak sesuai. Maka, semua kebijakan akan menghasilkan dampak (Subianto, 2020)). Berikut merupakan tahap pelaksanaan kebijakan publik menurut William Dunn.

- 1) Penyusunan Agenda, merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Prosedur ini mencakup identifikasi permasalahan atau permasalahan yang akan diangkat dan ditangani oleh perusahaan atau pemerintah.
- 2) Formulasi Kebijakan, pada fase ini sedang dikembangkan rencana atau kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat.

- 3) Adopsi Kebijakan, adalah salah satu tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik, kebijakan menunjuk pada titik di mana suatu kebijakan resmi diterima atau disahkan oleh pemerintah.
- 4) Implementasi Kebijakan, merupakan fase siklus kebijakan publik ketika kebijakan yang telah ditetapkan dipraktikkan. Sejumlah tugas terlibat dalam tahap implementasi untuk mengubah rencana kebijakan menjadi tindakan praktis.
- 5) Evaluasi Kebijakan, merupakan fase penting dalam siklus kebijakan publik yang mengevaluasi dampak, efisiensi, dan efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Memahami sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuannya dan memberikan umpan balik untuk modifikasi atau penyempurnaan di masa depan adalah dua manfaat dari penilaian kebijakan.

Keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh cara penerapannya. Jika suatu kebijakan menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat agar lebih fokus dan patuh terhadap arahan pemerintah. Oleh karena itu, melalui rancangan program dan struktur proses, pemerintah mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan. Maka, bisa dibayangkan jika tindakan, rancangan kegiatan, dan aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pilihan kebijakan berfungsi

untuk menggapai sebuah tujuan yang ditentukan dalam penentuan kebijakan (Desrinelti et al., 2021).

e. Tuntutan Kebijakan

Tuntutan kebijakan dapat muncul dari berbagai sumber, yang mencerminkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap pilihan atau pelaksanaan kebijakan tertentu oleh sebagian masyarakat. Suatu kebijakan mungkin diminta karena berbagai alasan, termasuk ketidaksenangan terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut, perasaan tidak adil dalam distribusi manfaat, atau ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menangani dan melaksanakan program tersebut. Tidak adanya keterbukaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga dapat menimbulkan tuntutan terhadap kebijakan. Tuntutan dapat muncul jika individu yakin bahwa kepentingan dan tujuan mereka tidak diperhitungkan saat kebijakan dibuat. Selain itu, permintaan peraturan juga dapat timbul karena adanya perbedaan keyakinan, nilai, dan pandangan berbagai kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok tertentu mungkin menggunakan tuntutan dan protes untuk menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap kebijakan jika mereka merasa terpinggirkan atau kurang terwakili.

Pemerintah harus terlibat dalam wacana terbuka, berhubungan secara efektif dengan masyarakat, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang ketika merumuskan kebijakan. Menangani tuntutan

kebijakan secara efektif memerlukan jawaban yang bijaksana, seperti penilaian ulang kebijakan, modifikasi, atau penjelasan publik yang lebih baik untuk memperkuat legitimasi kebijakan (Wahab, 2012).

## **2. Teori Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan pemberian sebuah perkiraan, penilaian, atau evaluasi suatu kebijakan, dengan kata lain, menilai suatu kebijakan bisa memberikan dampak baik atau menghasilkan perubahan yang positif dibandingkan dengan kondisi sebelum kebijakan itu diterapkan, atau sebaliknya tidak memberikan dampak sama sekali terhadap suatu kebijakan. Menurut Anderson dalam Wayan (2020) evaluasi kebijakan merupakan “ *policy evaluation encompasses the estimation, assessment, or appraisal of a policy, including its content, implementation, goal attainment, and other effects* ” (Winarta et al., 2020).

Muhadjir dalam (Fitrianto, 2020) memberikan sebuah pendapat jika evaluasi kebijakan publik merupakan “Suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan publik dapat memiliki nilai guna dengan membandingkan hasil yang dihasilkan dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan atau direncanakan untuk kebijakan tersebut”. William N. Dunn mengatakan jika “Evaluasi melakukan banyak peran penting dalam analisis kebijakan, dan yang terpenting evaluasi menunjukkan seberapa baik kinerja kebijakan telah memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang”.

Menurut beberapa definisi evaluasi kebijakan oleh para ahli, penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik bekerja dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi juga berguna dalam mengidentifikasi perbedaan antara yang diharapkan dengan yang terjadi sebenarnya. Informasi yang akurat dan bisa dipercaya dari evaluasi diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan, mengukur seberapa besar kepentingan, nilai, dan peluang telah terpenuhi melalui upaya bersama masyarakat.

Evaluasi juga memberikan peran dalam mengklarifikasi dan menilai kembali kandungan yang menjadi dasar penetapan sasaran dan target kebijakan. Selain itu, evaluasi juga berperan dalam mengembangkan cara untuk menganalisis kebijakan, yang mencakup identifikasi serta penjabaran masalah dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, meskipun berhubungan dengan semua proses kebijakan, evaluasi kebijakan menjadi lebih fokus pada bagaimana kebijakan berjalan, terutama dalam penerapan kebijakan publik. Evaluasi pada tahap “perumusan” dilaksanakan setelah adanya langkah yang diambil, lebih menekankan terhadap proses perumusan daripada konten kebijakan, yang umumnya cuma memandangi kesesuaian proses dengan prosedur yang telah disepakati (Apriliani et al., 2019).

Ada hubungan erat antara evaluasi kebijakan dan proses implementasi. Penerapan kebijakan merupakan faktor terpenting yang

sangat mempengaruhi penyelesaian setiap permasalahan publik. Implementasinya juga menunjukkan apakah pemerintah merespons dengan tepat dan menggunakan strategi terbaik untuk memajukan kepentingan masyarakat. Sementara itu, tahapan kebijakan diakhiri dengan evaluasi kebijakan. Pada titik ini, terlihat jelas bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, serta manfaat dan kelemahannya, dan apakah kebijakan tersebut mempunyai dampak positif atau buruk. Penilaian juga berfungsi sebagai standar bagi kebijakan-kebijakan mendatang yang diambil oleh pemerintah atau pihak yang berwenang melaksanakan kebijakan tersebut (Permatasari, 2020).

Evaluasi memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat mengenai manfaat dari seluruh proses kebijakan. Evaluasi lebih menekankan pada kinerja kebijakan selama implementasinya (Puji Lestari, 2022). Adapun tujuan evaluasi :

- a. Evaluasi memberikan informasi sampai mana pelaksanaan kebijakan terkait bisa menutup kebutuhan dan nilai-nilai, serta manfaat yang dapat dicapai melalui kebijakan publik. Evaluasi juga berguna untuk menilai sejauh mana target dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Evaluasi berperan dalam menjelaskan dan menilai secara kritis nilai-nilai yang menjadi dasar tujuan dan target. Klarifikasi nilai diartikan sebagai upaya untuk mendefinisikan agar nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan secara efektif dalam mencapai tujuan dan target.

Selain itu evaluasi juga melakukan kritik secara sistematis untuk menentukan apakah nilai-nilai tersebut sesuai dengan tujuan dan target terkait masalah. Penilaian mengenai kelayakan dilakukan melalui uji alternatif dengan melibatkan kelompok kepenetangan, ASN, dan kelompok non-pemerintah, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, legal, sosial, dan substantif.

- c. Evaluasi digunakan dalam analisis kebijakan sebagai cara pengembangan masalah dan rekomendasi. Kemampuan kebijakan dalam merumuskan kembali isu-isu terkait kebijakan diukur dengan penilaian kinerja kebijakan. Jika suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dan mendefinisikan kembali tantangan-tantangan kebijakan, maka kebijakan tersebut dianggap memadai. Hasilnya, evaluasi kebijakan dapat membantu mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan baru dan memberikan bukti bahwa pilihan-pilihan yang diprioritaskan di masa lalu tidak efektif dan harus diganti dengan pilihan-pilihan baru.

Proses evaluasi kebijakan melibatkan sejumlah kepentingan, sehingga akan menjadi masalah jika kriterianya tidak ditetapkan. Menurut Anderson dalam (Permatasari, 2020) permasalahan evaluasi kebijakan meliputi:

- a. Proses penetapan kebijakan menyebabkan ketidakpastian atau ketidakjelasan tentang tujuan kebijakan
- b. Sebab-Akibat

- c. Pengaruh kebijakan tersebar luas jika pengaruh tersebut merupakan bagian dari kondisi kelompok lain daripada kelompok sasaran utama.
- d. Sulit untuk memperoleh data, terutama statistik dan data penting untuk pelaksanaan evaluasi.
- e. Ketahanan pejabat, di mana penilai harus objektif dalam mengumpulkan data.
- f. Dampak evaluasi dapat berkurang, sehingga dapat diabaikan atau tidak diberikan perhatian yang cukup

Sebaliknya, ada delapan alasan mengapa kebijakan tidak memberikan dampak yang diinginkan. Anderson mencantumkan delapan faktor berikut:

- a. Sumber yang tidak mencukupi.
- b. Teknik pengembangan kebijakan.
- c. Masalah publik yang disebabkan oleh berbagai faktor, sementara kebijakan yang tengah dilaksanakan hanya memperhatikan satu masalah.
- d. Metode yang digunakan oleh masyarakat untuk menanggapi dan membiasakan diri dengan kebijakan publik.
- e. Tujuan kebijakan saling bertentangan satu sama lain.
- f. Biaya yang besar.
- g. Kegagalan untuk menyelesaikan banyak masalah publik.

- h. Terkait dengan karakteristik masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan (Permatasari, 2020).

Tahap akhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Pada titik ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, manfaat dan kelemahannya, serta apakah kebijakan tersebut membawa dampak menguntungkan atau buruk. Penilaian juga berfungsi sebagai standar bagi kebijakan-kebijakan mendatang yang diambil oleh pemerintah atau pihak yang berwenang melaksanakan kebijakan tersebut.

Edward A. Suchman dalam (Atika Supriadi et al., 2021) menjelaskan tindakan-tindakan yang perlu diambil ketika menilai kebijakan publik, diantaranya:

- a. Mengidentifikasi program dan tujuan.
- b. Menganalisa masalah.
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- d. Melakukan pemeriksaan.
- e. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan.
- f. Indikator-indikator penentu kemunculan dampak.

Melakukan penilain terhadap kebijakan publik bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya, serta kinerja, dampak, dan potensi penyimpangannya. Hal ini juga memberikan informasi berharga untuk perumusan kebijakan di masa depan, membantu menciptakan kebijakan yang lebih optimal.

### 3. UMKM

UMKM adalah jenis bisnis yang mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Indonesia. Pada pelaksanaannya, pengembangan UMKM perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi terkait adanya potensi untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Pertumbuhan dan kemajuan sektor UMKM sering dianggap sebagai tanda keberhasilan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang.

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat beragam dalam literatur, menurut berbagai instansi, lembaga, dan peraturan perundang-undangan. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berikut ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berikut syarat-syarat usaha mikro berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6:

- a. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya, usaha kecil atau mikro juga memiliki kriteria. Berikut kriteria bagi usaha kecil:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selain usaha kecil atau mikro, golongan usaha menengah juga memiliki beberapa kriteria. Berikut kriteria bagi usaha menengah :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ada banyak definisi UKM di negara lain atau yang dapat diterima berdasarkan ciri-ciri unik masing-masing negara, khususnya yang berikut ini.

- a. World Bank: UKM adalah perusahaan dengan karyawan kurang dari tiga puluh, pendapatan tahunan US\$ 3 juta, dan total aset di bawah US\$ 3 juta.
- b. Di Amerika: UKM didefinisikan sebagai industri dengan jumlah pekerja kurang dari 500 orang yang tidak dominan pada sektornya.
- c. Di Eropa: UKM adalah perusahaan dengan 10–40 karyawan dan pendapatan tahunan sebesar 1-2 juta euro; perusahaan dengan

- jumlah karyawan kurang dari 10 orang termasuk dalam kategori usaha rumah tangga.
- d. Di Jepang: UKM didefinisikan sebagai usaha dengan modal ¥ 50 juta hingga ¥ 300 juta dan tenaga kerja 54 hingga 300 karyawan yang bergerak di bidang manufaktur dan ritel/jasa.
  - e. Di Korea Selatan: UKM adalah perusahaan dengan <300 karyawan dan aset  $\leq$  \$60 juta.
  - f. Di beberapa Asia Tenggara: UKM merupakan perusahaan dengan tenaga kerja 10–15 karyawan di Thailand, 5–10 karyawan di Malaysia, atau 10–99 karyawan di Singapura, dengan modal kurang lebih US\$ 6 juta.

#### **4. Karakteristik UMKM di Indonesia**

Posisi strategis UMKM di Indonesia dapat dijelaskan oleh empat faktor yang tercantum pada karakteristiknya. Pertama, mendirikan UMKM lebih mudah dibandingkan mendirikan perusahaan besar karena tidak memerlukan jumlah investasi yang signifikan. Kedua, tidak diperlukan pendidikan formal khusus untuk memasuki dunia kerja. Ketiga, karena sebagian besar dari mereka berada di wilayah pedesaan, mereka tidak membutuhkan infrastruktur yang sama dengan perusahaan besar. Keempat, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, UMKM menunjukkan ketahanan yang luar biasa (Nur Sarfiah et al., 2019).

Menurut Saiman (2014) menyatakan bahwa karakter diartikan sebagai kualitas positif seseorang yang membuatnya menarik dan

menawan, termasuk reputasi serta kepribadian yang khas. Sunyoto (2013) menyatakan bahwa karakteristik merupakan sifat yang dimiliki seseorang. Aspek pribadi yang melekat pada seorang wirausaha sejak lahir dan dibentuk oleh pengalaman hidupnya disebut sebagai karakteristik individu. Menurut Ramanti (2006), karakteristik pribadi atau individual adalah sifat yang dimiliki dan dikomunikasikan oleh seseorang melalui, tindakan, perkataan, dan sikapnya. Ada dua unsur yang mempengaruhi sifat manusia, yaitu karakter pribadi dan kondisional. Ciri-ciri pribadi meliputi faktor-faktor yang melekat pada diri seseorang, sebaliknya sifat-sifat kondisional meliputi unsur-unsur yang muncul dari lingkungan luar individu dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seseorang.

Karakteristik psikologis sering menjadi fokus penelitian terkait kewirausahaan, terutama dalam hal rasionalitas, fleksibilitas mental, orientasi terhadap pertanian sebagai bisnis, dan keterbukaan terhadap inovasi. Penelitian terkait kewirausahaan seringkali menggunakan aspek pribadi tersebut sebagai objek penelitian. Menurut Dirlanudin (2010), wirausaha memiliki ciri-ciri biologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang wirausaha, seperti pengetahuan usaha, alasan bisnis, alasan bisnis, pekerjaan orang tua, dan motivasi, seperti ketekunan, kegigihan, dan keinginan untuk berhasil (Iskandar et al., 2020).

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dengan tujuan yang jelas untuk mencapai suatu hasil bukan sekadar hasil. Tindakan-tindakan ini tidak merupakan hasil dari pilihan individu, tapi saling terkait dan menciptakan pola yang mengarah pada pencapaian tujuan pemerintah. Kebijakan publik merupakan sebuah arahan yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu apabila kebijakan tersebut dilaksanakan dengan kesadaran, tujuan, dan kesengajaan dalam suatu hal tertentu. Kebijakan publik dapat berfungsi sebagai strategi dalam menangani berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul, serta sebagai keputusan untuk tidak mengambil tindakan.

### **2. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan dengan kata lain adalah proses pemberian perkiraan, penilaian, atau tinjauan terhadap suatu kebijakan. Hal ini menentukan apakah suatu kebijakan dapat berdampak lebih baik atau perbaikan dari sebelum kebijakan diterapkan, atau sebaliknya apakah tidak mempengaruhi sama sekali perubahan kebijakan.

### **3. UMKM**

UMKM adalah kategori tertentu dari usaha kecil berbasis lokal yang dimulai oleh seorang individu. UMKM saat ini memainkan peran yang semakin besar dalam kegiatan komersial. UMKM berperan besar dalam menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Beberapa

masyarakat Indonesia yang menganggur mungkin terlibat dalam UMKM. Pendapatan negara Indonesia dan pendapatan daerah juga terkena dampak signifikan dari UMKM.

## H. Definisi Operasional

**Tabel 1. 2 Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Evaluasi Kebijakan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Efektivitas yaitu diartikan untuk melihat apakah kebijakan tersebut mencapai hasil yang dicita-citakan.</li> <li>2) Efisiensi yaitu berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk bisa menciptakan efektivitas.</li> <li>3) Kecukupan yaitu berkaitan dengan sejauh mana efektivitas dapat memenuhi seluruh keputusan, nilai atau kesempatan yang menjadi alasan berkembangnya masalah.</li> <li>4) Perataan berkaitan dengan distribusi kebijakan apakah dilakukan secara merata dan adil atau tidak pada seluruh elemen masyarakat.</li> <li>5) Responsivitas yaitu berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan, preferensi atau nilai dari masyarakat kelompok tertentu.</li> <li>6) Ketepatan yaitu indikator yang berhubungan dengan rasionalitas substantive. Indikator ini memiliki fokus pada nilai dari tujuan kegiatan yang menjadi fokus utama dari tujuan-tujuan yang melandasinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi formulasi kebijakan publik</li> <li>2) Evaluasi implementasi kebijakan publik</li> <li>3) Evaluasi kinerja kebijakan publik</li> <li>4) Evaluasi lingkungan</li> </ol>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif penelitian berupa pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendefinisikan sebuah persoalan yang terjadi baik secara alami maupun buatan manusia. Fokus penelitian ini terletak pada evaluasi kebijakan jalan satu arah terhadap UMKM di sekitar Alun-Alun Kebumen. Dari hasil penelitian tersebut maka penulis akan memperoleh data deskriptif berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber penelitian ini, yaitu pelaku UMKM. Menurut Faisal (1992), metode penelitian deskriptif kualitatif melibatkan eksplorasi dan klasifikasi fenomena atau pernyataan social tertentu. Hal ini digunakan untuk meringankan atau mengenali permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Tujuan utama metode ini yaitu untuk memberikan penjelasan obyektif mengenai situasi tersebut.

Menurut (Sugiyono, 2009), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi objek dalam keadaan alami, berbeda dengan metode eksperimen. Peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian ini, dan sumber dan data dikumpulkan secara purposive dan snowbaal. Analisis triangulasi (gabungan) digunakan dalam proses pengumpulan data ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada arti daripada generalisasi (Fatimah et al., 2022).

Penulis memilih metode ini karena dianggap sesuai dengan topik yang akan diteliti dan memungkinkan bagi penulis untuk dapat menjelaskan deskripsi secara rinci mengenai evaluasi kebijakan terhadap UMKM di sekitar Alun-Alun Kebumen.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan disekitar Alun-Alun Kota Kebumen. Tepatnya di beberapa titik rute jalan yang berubah menjadi satu arah, khususnya di beberapa titik potensial UMKM. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan program jalan satu arah tersebut mempengaruhi keberlangsungan UMKM sekitar. Di dalam peneltian ini penulis akan mengevaluasi dampak yang diakibatkan oleh kebijakan jalan satu arah di sekitar alun-alun Kebumen.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data penelitian primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung atau langsung dari subjek penelitian. Karena data ini akan menjadi landasan bagi proses penyelesaian masalah, maka data ini adalah data yang asli, tidak memihak, dan dapat dipercaya. Data asli tersebut dapat berupa hasil wawancara subjek, angket, tes, dan lain sebagainya. Data primer dikumpulkan langsung di lapangan melalui proses wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan para pedagang di jalan satu arah sekitar alun-alun Kota Kebumen. Selain itu, penulis memanfaatkan data observasi yang dikumpulkan

dengan menyaksikan peristiwa di jalan satu arah sekitar alun-alun Kota Kebumen (Nasution, 2023).

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder diambil dari kumpulan penelitian terdahulu yang selaras dengan judul penelitian , dan informasi tentang kebijakan/program pemerintah. Dalam penelitian ini, penggunaan data sekunder menjadi esensial guna memperkuat argumen yang disajikan oleh penulis, sekaligus melengkapi informasi yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara langsung oleh pihak terkait (Nasution, 2023).

## **J. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memanfaatkan berbagai metode untuk mengumpulkan data :

1. Wawancara

Dilakukan Untuk mengetahui pendapat dan pengalaman mereka terhadap kebijakan lalu lintas satu arah, dilakukan wawancara terhadap pemilik UMKM, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pemilik UMKM dijadikan sebagai narasumber terkait sebagai pihak yang terdampak kebijakan ini. Sedangkan Pemda sebagai narasumber terkait pihak pelaksana kebijakan.

2. Observasi

Setelah kebijakan diberlakukan, lakukan observasi langsung ke lapangan untuk menelusuri perubahan. Observasi dilakukan untuk

mengetahui atau mengamati secara langsung bagaimana kondisi di lokasi penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Jalan Pahlawan dan Jalan Mayjen Sutoyo yang merupakan lokasi yang terdampak kebijakan ini.

### 3. Dokumentasi

Proses pendokumentasian adalah proses pembuktian yang diambil dari berbagai sumber, termasuk bahan tertulis, lisan, ringkasan, dan arkeologi. Foto, transkrip wawancara, dan data terkait penelitian lainnya digunakan untuk mendokumentasikan penelitian ini.

## **K. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2017), pengolahan data adalah langkah-langkah secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Informasi ini kemudian diorganisir menjadi beberapa kategori, dideskripsikan menjadi unit-unit, mensintesis. Dan dipilih yang terpentingnya serta apa yang dipelajari dari informasi tersebut. Tujuannya agar diri sendiri atau orang lain dapat memahami kesimpulan yang diambil. Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2007) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

## 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup besar perlu dicatat dengan cermat dan rinci, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data. Reduksi data bukan hanya suatu tindakan mekanis, keluasaan, dan pemahaman yang mendalam. Bagi peneliti yang masih baru, proses ini dapat ditingkatkan melalui diskusi dengan individu atau kelompok ahli. Dengan dialog ini, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi data yang paling berharga dan berkontribusi besar terhadap perkembangan teori.

## 2. Penyajian Data

Penyajian informasi dapat diwujudkan melalui berbagai format, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau metode serupa. Cara penyajian data ini penting untuk mengungkapkan hasil penelitian sesuai dengan metode dan prosedur yang diterapkan. Dengan menggunakan sistem yang disesuaikan dengan fokus penelitian, penyajian data dapat memperjelas hubungan dan analisis relevan dari hasil yang diperoleh. Menampilkan data dengan cara yang tepat dapat mempermudah pemahaman tentang informasi yang dihasilkan, sehingga memungkinkan perencanaan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing or verification*)

Temuan dari penelitian tersebut didasarkan pada analisis data deskriptif terhadap objek yang telah diteliti. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat dan mendukung terhadap langkah pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan awal dapat diterima jika ditemukan bukti yang valid dan konsisten selama pengumpulan data. Hasil penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dibuat pada awalnya, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalahnya bersifat sementara dan berubah saat peneliti bekerja di lapangan.

